

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(STUDI PADA BPKAD KABUPATEN BUTON TENGAH)**

Muhamad Safrin^{*1}, Endang Tri Pratiwi²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: muhamadsafrin6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan *good government governance* sebagai variabel *intervening* pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan kuisisioner/angket dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi dari pegawai yang ada di kantor BPKAD Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, pengendalian intern dan *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern dan *Good Government Governance* Dinas BPKAD Kabupaten. Buton Tengah berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, *Good Government Government Governance*, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the internal control system on the quality of financial reports with good government governance as an intervening variable at BPKAD Central Buton Regency. The research method used is quantitative. The data collection method used in this research is to use a questionnaire/questionnaire and documentation. The sample in this study was the entire population of employees at the BPKAD office in Central Buton Regency. The results of the study indicate that the Internal Control System and Good Government Governance affect the Quality of Financial Reports. That is, internal control and good government governance affect the quality of financial reports. This shows that the variables of internal control and Good Government Governance at the Regency BPKAD Office. Buton Tengah has a strong influence on the quality of financial reports.

Keywords: Internal Control, *Good Government Governance*, Quality Of Financial Report

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* merupakan hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan dan akuntabilitas administrasi publik dewasa ini. Menurut Maulana (2015) tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya. Tata kelola pemerintah yang baik erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya. Syafitri (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Penelitian yang berkaitan dengan *good government governance* memang telah banyak diangkat seperti halnya penelitian Solikin (2008), Solikin dan Memen (2011), Zeyn (2011), Azlim et al. (2012), Sari (2013), Ristanti et al (2014) . Namun, penelitian mengenai system pengendalian intern, system akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan daerah atau suatu organisasi masih terbatas. Karena penelitian yang diangkat lebih banyak mengarah pada pengawasan keuangan daerah, anggaran dan kinerja.

Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu daerah otonomi yang dilakukan pemekaran pada tahun 2015. Dalam perkembangan tata kelola pemerintahannya tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang tentunya menjadi bahan evaluasi oleh pemerintahan Kabupaten Buton Tengah dari tahun ketahun. Pada saat sekarang ini pengendalian intern dalam pemerintah daerah atau lembaga organisasi perangkat daerah mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan oprasional dan kinerja dilakukan dalam suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatan tata kelola pemerintahannya. Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya, Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik. Berdasarkan pengamatan awal peneliti mengamati bahwa masih belum tersedianya tenaga pelaporan yang telah memiliki kompetensi dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan, pejabat pengelola keuangan SKPD belum maksimal dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara sesama pejabat

pengelola keuangan SKPD. Masih rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan dan administrasi pengelolaan aset dimasing-masing SKPD. Penelitian ini untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan *Good Government Governance* Sebagai Variable Intervening Pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang terkait dengan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh (Nugraha) pada OPD di daerah Bandung. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, terhadap kualitas laporan keuangan dengan *Good Government Governance* sebagai variabel intervening.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan , pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern termasuk salah satu bagian dari pengendalian Intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi bahwa system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan sangat diperlukan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 di atas bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi Lingkup Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasih dan Pemantauan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah sebagai sebuah entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik yang disajikan dalam suatu bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.3. Pengertian *Good Government Governance*

Good Government Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Sedarmayanti (2013).

Terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

- 1) *Politcal Governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*policy/strategyformulation*).
- 2) *Economic Governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yangmemfasilitasi terhadap *equity* (kekayaan), *proverty* (properti), serta *quality of life* (kualitashidup).
- 3) *Administrative Governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam Sari (2013) ,mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip

yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah:

- 1) Partisipasi(*participation*)
- 2) Transparansi(*transparency*)
- 3) Akuntabilitas(*accountability*)
- 4) Kemandirian(*independency*)
- 5) Pertanggungjawaban(*responsibility*)

2.4 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian intern pada pemerintah diatur dalam PP No. 60/2008 yaitu: system pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Tujuan system pengendalian intern menurut Warren et al (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Suatu system berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan system informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja system informasi akuntansi (*internal control*)

2.5 Pengaruh *Good Governmet governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah berkualitas, secara konseptual pengertian tata kelola pemerintah yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saat ini dan kedepan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintah yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangannya (Kusmayadi 2015).

2.6 Pengaruh Sistem pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui *Good Government Governance*.

Pengendalian intern berguna untuk terciptanya pemerintahan yang baik meningkatkan kualitas informasi keuangan efektifitas rancangan system pengendalian akuntansi tergantung kontek penggunaannya pada masing-masing organisasi itu sendiri. Pencapaian *good government governance* dapat digunakan system pengendalian intern yang akan menunjukkan seberapa besar kualitas informasi keuangan. Operasional dan manajerial pada suatu organisasi (Dharma,2014),

Sukmanigrum (2012) mengemukakan bahwa, system pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas, dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good government governance* dan garis pertama dalam melawan ketidak absahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Sehingga pengendalian intern pemerintah berhubunga dengan *good government governance*. (Nurilah, 2014) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi dikarenakan masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2016) populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bidang dalam BPKAD baik pegawai ASN maupun pegawai magang yaitu:

Tabel 2.2. Bidang BPKAD

No	Bidang	Jumlah
1.	Kesekretariatan	8/ Orang
2.	Akuntansi	7/ Orang
3.	Perbendaharaan	16/ Orang
4.	Aset	7/ Orang
5.	Penganggaran	4/ Orang
<i>Total</i>		42/ Orang

Sumber : BPKAD Kabupaten Buton Tengah

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Jenis teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasinya relative kecil, yaitu sebanyak bidang yang ada di BPKAD sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi, sampel yang digunakan adalah berjumlah 42 Responden.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Bila di lihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan sumber data primer, yakni berupa Kuisisioner dan data pendukung lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Observasi adalah peninjauan langsung dengan mengadakan pengamatan data yang berhubungan langsung dengan penelitian.
2. Kuisisioner/Angket yang merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda merupakan teknik statistic analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui dampak variable mediasi atau intervening terhadap hubungan antara variable bebas dengan variable terikat.

Persamaan regresi (Sugiyono : 2016)

$$Z = a + bX + \epsilon$$

$$Y = a + bX + bZ + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan.
- X = Sistem Pengendalian Internal
- Z = *good government governance*
- a = Konstanta (nilai Y apabila X, Z.....Xn, Zn = 0)
- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- ε = error term (Epsilon)

3.4.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2012). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1&0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha (α).

- a. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik
- b. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima
- c. Kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

3.4.2 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2012). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Kesesuaian harga r_{xy} diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut dan dikonsultasikan dengan tabel harga regresi moment dengan korelasi harga r_{xy} lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir instrumen

tersebut valid dan jika r_{xy} lebih kecil dari regresi tabel maka butir instrumen tersebut tidak valid.

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R²) berarti semakin tinggi kemampuan variabel *independent* dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel *dependent*.

3.5 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila *probability* t hitung > 0,05 Ho diterima dan H1 ditolak.
2. Bila *probability* t hitung < 0,05 Ho ditolak dan H1 diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin responden tiap bidang BPKAD Kabupaten Buton Tengah :

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	24	57,15%
Perempuan	18	42,85%
Total	42	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dilihat dari tabel diatas, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terbanyak adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 24 orang responden (57,15%) dan

responden perempuan sebanyak 18 orang responden (42,85%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berikut merupakan klasifikasi berdasarkan umur responden bidang BPKAD Kabupaten Buton Tengah :

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentasi
26 – 35 tahun	12	28,58 %
36 – 45 tahun	16	38,09 %
46 – 55 tahun	11	26,19 %
≥ 56 tahun	3	7,14 %
Total	42	100 %

Sumber Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, responden terbanyak berumur 36-45 tahun sebanyak 16 orang atau 38,09%, kemudian usia 26-35 tahun sebanyak 12 orang atau 28,58%, usia 46-55 tahun sebanyak 11 orang atau 26,19%, dan paling sedikit pada usia ≥ 56 tahun sebanyak 3 orang atau 7,14%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut merupakan klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan responden bidang BPKAD Kabupaten Buton Tengah :

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	9	21,43 %
Diploma	5	11,90 %
S1	21	50 %
S2	7	16,67 %
Total	42	100 %

Sumber Data Primer diolah 2021

Sebagian besar responden berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 21 orang atau 50%, kemudian disusul responden yang berpendidikan SMA/SMK memiliki sebanyak 9 orang atau 21,43%, kemudian yang berpendidikan (S2) sebanyak 7 orang atau 16,67%, kemudian paling sedikit yaitu responden yang berpendidikan diploma sebanyak 5 orang

atau 11,90%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Berikut merupakan klasifikasi berdasarkan lama menjabat bidang BPKAD Kabupaten Buton Tengah :

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Lama Menjabat	Jumlah	Persentase
≤ 1 – 5 tahun	12	28,57 %
6 – 10 tahun	18	42,86 %
11 – 15 tahun	8	19,05 %
>15 tahun	4	9,52 %
Total	42	100 %

Sumber Data Primer diolah 2021

Sebagian besar responden lama menjabat pada kurang dari 1-5 tahun sebanyak 12 orang responden atau 28,57%, kemudian selama 6-10 tahun sebanyak 18 orang responden atau 42,86%, kemudian selama 11-15 tahun sebanyak 8 orang responden atau 19,05 % dan kemudian selama ≥ 15 tahun sebanyak 4 orang responden atau 9,52%.

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Reliabilitas Data

Indikator	Jumlah Item Pertanyaan	Nilai r	Keterangan
X	8	0,706	Reliabel
Y	8	0,864	Reliabel
Z	8	0,653	Reliabel

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 5. tersebut disimpulkan bahwa semua item indikator yang digunakan untuk mengukur masing masing variabel indikatornya memiliki angka koefisien lebih besar dari 0,60. Karena itu, instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data dapat dinyatakan reliable.

4.3 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode statistic *produk momen pearson* dengan criteria jika r yang di peroleh $> 0,30$ pada, taraf kepercayaan 95%, maka instrument (kuesioner) dinyatakan Valid. Hasil uji validitas instrument dimaksudkan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrument pada Taraf Signifikansi $\alpha = 0,05$

Indikator	Nilai r	Tingkat signifikansi	Keterangan
X1	0,675	0,000	Valid
X2	0,482	0,001	Valid
X3	0,574	0,000	Valid
X4	0,314	0,043	Valid
X5	0,770	0,000	Valid
X6	0,717	0,000	Valid
X7	0,384	0,012	Valid
X8	0,541	0,000	Valid
Z1	0,778	0,000	Valid
Z2	0,74	0,002	Valid
Z3	0,434	0,004	Valid
Z4	0,496	0,001	Valid
Z5	0,534	0,000	Valid
Z6	0,442	0,003	Valid
Z7	0,645	0,000	Valid
Z8	0,515	0,000	Valid
Y1	0,799	0,000	Valid
Y2	0,787	0,000	Valid
Y3	0,701	0,000	Valid
Y4	0,676	0,000	Valid
Y5	0,717	0,000	Valid
Y6	0,727	0,000	Valid
Y7	0,684	0,000	Valid
Y8	0,700	0,000	Valid

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa semua item indikator yang mengukur masing-masing variabel indikator menghasilkan angka koefisien validitas yang lebih dari 0,3 ($r > 0,3$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Hasi Uji X Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.363 ^a	0,132	0,110	3,69636
a. Predictors: (Constant), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,110 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y adalah sebesar 11,0%. Sedangkan sisanya 89,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Tabel 8. Uji X Terhadap Z

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.456 ^a	0,028	0,188	2,34801
a. Predictors: (Constant), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,188 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X secara simultan terhadap Z adalah sebesar 18,8%. Sedangkan sisanya 82,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Tabel 9. Uji Z Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.451 ^a	0,204	0,184	3,54033
a. Predictors: (Constant), good government governance				

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,184 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel intervening Z secara simultan terhadap Y adalah sebesar 18,4%. Sedangkan sisanya 82,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Tabel 10. Uji X Terhadap Y Melalui Z

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	0,235	0,196	3,51432
a. Predictors: (Constant), good government governance, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,235 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel intervening Z secara simultan terhadap Y adalah sebesar 19,6%. Sedangkan sisanya 80,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

4.5 Uji t

Hasil Uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji X Terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,712	6,725		2,485	0,017

	sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	0,505	0,205	0,363	2,466	0,018
a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan						

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Diketahui nilai signifikansi Untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar $0,018 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,466 > 2,018 t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa X diterima yang berarti terdapat pengaruh X terhadap Y.

Tabel 12. Hasil Uji X Terhadap Z

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,697	4,272		4,142	0,000
	sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	0,422	0,130	0,456	3,243	0,002
a. Dependent Variable: good government governance						

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Diketahui nilai signifikansi Untuk pengaruh X terhadap Z adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,243 > 2,018 t_{tabel}$ sehingga dapat di simpulkan bahwa X diterima yang berarti terdapat pengaruh X terhadap Y.

Tabel 13. Hasil Uji Z Terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,861	6,705		1,769	0,045
	good government governance	0,679	0,212	0,451	3,199	0,003
a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan						

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Diketahui nilai signifikansi Untuk pengaruh Z terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,199 > 2,018 t_{tabel}$ sehingga dapat di simpulkan bahwa Z diterima yang berarti terdapat pengaruh Z terhadap Y

Tabel 14. Hasil Uji X Terhadap Y Melalui Z

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,115	7,643		0,931	0,358
	sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	0,276	0,219	0,199	1,263	0,214
	good government governance	0,542	0,237	0,361	2,292	0,027

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber : SPSS versi 25, Data primer diolah 2021

Di ketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X terhadap Y melalui Z adalah sebesar $0,027 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,292 > 2,018 t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Z diterima yang berarti terdapat pengaruh X dan Z terhadap Y.

4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian path analisis yaitu hipotesis (Ha1) diterima. Artinya Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Buton Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal berpengaruh langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebesar 0,132 atau sebesar 13,2%. Di mana Sistem Pengendalian Internal diukur dengan 4 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian dan pemantauan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPKAD mampu memberikan pengawasan pada pemerintah daerah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga baik untuk sector pemerinta kabupaten buton tengah dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang di inginkan.

Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang terkait dengan pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh (Nugraha, 2011) pada OPD di daerah Bandung. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di kantor BPKAD Kabupaten Buton Tengah.

4.7 Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yaitu 0,204 atau sebesar 20,4%.. Hal ini berarti bahwa kualitas informasi laporan keuangan dapat dicapai jika instansi menerapkan prinsip GGG. Pelaksanaan *Good Government Governance* pada dinas BPKAD Kabupaten Buton Tengah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti *transparansi* (keterbukaan) *akuntabilitas*, *responsibilitas*, *independensi*, kewajaran dan kesetaraan, sehingga sumber daya yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah *akuntabilitas dan transparansi* dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2012), menemukan bahwa penerapan *good government governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan system keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggung jawabkan dalam pelaporan keuangan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas public, pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh Efanita (2013) yang menyebutkan bahwa penyerapan prinsip-prinsip *good government governance* dealam penyelenggaraan pemerintahan sangat perlu sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

4.8 Sistem Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian path analisis yaitu hipotesis ke tiga (Ha3) diterima diman variabel sistem pengendalian internal dan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan. Sistem pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,505 atau sebesar 50,5% dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,286 atau sebesar 28,6%, karena melalui variabel intervening yaitu *good government governance* sehingga hasil pengaruh totalnya yaitu 0,791 atau 7,91%.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah di lakukan oleh Dimas, Sri dan Indri (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian di perkuat oleh pendapat sukmaningrum (2012) “sistem pengendalian internal merupakan pondasi *good government governance* dan garis pertama dalam melawan ketidahaabsahan data dan informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya pemahaman pengendalian internal melalui tata kelola pemerintah yang baik dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi empat criteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik kualitas suatu laporan keuangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuanganditerima. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal berpengaruh langsung terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Pengaruh *Good Governance Governanc* terhadap Kualitas Lpaoran Keuanganditerima. Dalam hasil bahwa *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Pelaksanaan *Good Government Governance* pada dinas BPKAD

Kabupaten Buton Tengah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sesuai dengan Prinsip-prinsip GGG.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. Artinya, pengendalian intern dan *good government governanc* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern dan *Good Government Governance* Dinas BPKAD Kabupaten Buton Tengah berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BPKAD Kabupaten Buton Tengah, maka penulis menyarankan :

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka perlu dilakukannya penelitian ulang dengan cara meningkatkan metodologi yang akan digunakan khususnya pada wawancara langsung dan pembagian kuisisioner (Angket) terhadap koresponden, sehingga akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan pemerintah lebih terkhusus di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Tengah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2012. *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*, Edisi revisi v, Cet ke-12 Rineka Cipta Jakarta.
- Azlin, Darwanis, dan Usman Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hlm: 1- 14.
- Dharma Setyawan Salam. 2015. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Kusmayadi, Dedi. 20014. *Pengaruh Audit Operasional terhadap Penerapan Akuntans Pertanggungjawaban dan Implementasi Strategi serta Dampaknya pada Kinerja*

*Perusahaan (Survey pada Perusahaan Manufaktur Aneka Industry Go Public),
Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.*

- Maulana, H. 2015. *pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib lkp.* Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Nurillah (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).*
- Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton*
- Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan).* e-Journal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1): 2-14.
- Sedarmayanti, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).* Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.* Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Solikin, Ikin. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi dan Kualitas Aparatu Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan (Survey pada pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat)* Prosiding Seminar Nasional Forum Bisnis & Keuangan: 53-70. dan Memen Kustiawan. 2011. *Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pernerdayaan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance.* Artikel. Bandung: STIA-LAN.
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung
- Sari, Diana. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten).* Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Warren, Carl S., James M. Reeve dan Philip E. Fess. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21, Buku 1, Cetakan 1, Terjemahan oleh AriaFarahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan, Jakarta: Salemba Empat.

Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Government dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas Keuangan*. *Jurnal Trikonomika*, Vol. 10, No. 1: 52-62.